



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2019

**DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Februari 2020

Kepala,

H. M. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.SI.

Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19670817 199203 1 017



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu permasalahan terjadinya disfungsi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah terjadinya disfungsi sosial, baik akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan, keterasingan, korban tindak kekerasan maupun akibat korban bencana. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD yang menangani permasalahan tersebut diatas sangat berkomitmen untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial masyarakat yang hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Palaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas yang utuh.

Adapun kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 251.234 jiwa. Pencapaian penanganan PMKS dengan Program dan Kegiatan yang ada telah mampu menurunkan 1,48% PMKS dengan kondisi tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur sebesar kurang lebih 5 - 6%.

Kondisi ini terlihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya pada posisi cc meningkat menjadi B dengan nilai 68.77.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Aparatur	7
E. Aspek Strategis Organisasi	8
F. Isu-isu Strategis	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	9
 BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	11
1. Visi	11
2. Misi	12
3. Tujuan	12
4. Sasaran	13
5. Indikator Kinerja Sasaran	13
6. Target Tahunan	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
C. PERNAJIAN KINERJA TAHUN 2019	21



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi	22
B. Pengukuran Capaian Kinerja	22
C. Analisis Capaian Kinerja	23
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	23
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019	23
3. Perbandingan Realisasi Kinerja	24
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	24
5. Analisis Program / Kegiatan	25
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
D. Realisasi Anggaran	28
1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	28
2. Realisasi Anggaran per Program / Kegiatan	28
A. Realisasi Anggaran APBD	29
B. Realisasi Anggaran APBN	30
C. Perkembangan Jumlah Anggaran	31

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	33
B. Saran	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sumber Daya Aparatur (SDA)	7
2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim	9
3. Target Tahunan	16
4. Program dan Kegiatan	16
5. Penetapan Indikator Kinerja Utama	21
6. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	21
7. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
8. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	23
9. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	23
10. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	23
11. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	24
12. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial	28
13. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja	28
14. Realisasi Anggaran APBD	29
15. Realisasi Anggaran APBN	30



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019	31
2. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendataan komunitas adat terpencil serta melakukan pengkajian komunitas adat terpencil;

- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Pengumpul & Pengolah Sumber Dana Sosial, mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- c. Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- a. Seksi Rehabilitasi Disabilitas, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- b. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kesejahteraan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal serta lanjut usia terlantar;
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila, Napza, Korban Tindak Kekerasan serta Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi tuna sosial, korban napza dan korban tindak kekerasan serta korban perdagangan orang / *human trafficking*.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- a. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistic serta form keserasian sosial dengan kearifan local;

- b. Seksi Penanganan Korban Bencana Alam, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikososial;
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pendayagunaan sumber dana sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan kesejahteraan sosial.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada fakir miskin di perkotaan;
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada fakir miskin di Perdesaan;
- c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Perbatasan Terpencil dan Pulau Terluar, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada fakir miskin di daerah perbatasan terpencil dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 unit yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari :

a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) Samarinda

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial.

Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Daya tampung 80 (Delapan Puluh) anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) Samarinda.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan dengan susunan.

Fungsi Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPA) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.

Daya tampung 80 anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu:
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan dan Advokasi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial remaja terlantar.

Fungsi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis

operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar.

Daya tampung sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

d. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri (PSTWNP) Samarinda

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Daya tampung 110 (seratus sepuluh) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

e. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (PSKW) Samarinda.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Fungsi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking. Pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Daya tampung 60 (enam puluh) orang dengan susunan. Struktur Organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial;
- Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Sampai dengan 30 Desember 2019 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 187 orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Bidang dan Kepala Panti	4	5	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Kepala Seksi	16	5	4	19	0	0	4	19	0	0	0	0
Staff PNS	104	51	0	71	70	13	1	45	7	84	7	11
Honorer / PTT	76	31	0	0	0	0	0	42	6	55	2	2
Jumlah PNS	126	61	13	90	70	14	15	63	7	84	7	11
Jumlah Honorer/PTT	76	31	0	0	0	0	0	42	6	55	2	2
Jumlah PNS + Honorer / PTT	126	61	13	90	70	14	15	100	12	127	8	16
JUMLAH KESELURUAHAN	294		187				296					

E. Aspek Strategis Organisasi

Pembangunan kesejahteraan sosial di tuju untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial.

F. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Isu Strategis).

1. Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu strategis dalam penanganan Penanyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengacu pada prioritas pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu berfokus pada :
 - a. Informasi data PMKS melalui Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan dan penanganan PMKS Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota;
 - b. Penanganan Disabilitas Terlantar;
 - c. Pemberian keterampilan berusaha bagi PMKS dengan mekanisme pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) dan kelompok usaha kerja bersana (KUBE);
 - d. Bantuan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE);
 - e. Penanganan PMKS lainnya berbasis pada Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.

2. Potensi Permasalahan Sosial Sosial Terkait Penetapan Ibukota Negara (IKN)

Republik Indonesia

- a. Terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terjadi urbanisasi pada pekerja migran baik yang memiliki keahlian maupun yang tidak memiliki keahlian sehingga potensi pekerja migran terlanter akan meningkat dan masalah sosial lainnya (gelandang, pengemis dll);
- b. Langkah antisipasi dengan pembentukan Panti Sosial Terpadu yang pernah di wacanakan pada Tahun Anggaran 2014 untuk direalisasikan / dilanjutkan kembali;
- c. Perlunya di bentuk Unit Layanan Penanganan Masalah Sosial (On Call) stand by 24 jam melalui Tim Unit Tanggap Sosial (TUNTAS) yang akan di rencanakan pada Tahun Anggaran 2021;
- d. Penyediaan Sarana Mobilitas Darat Tim TUNTAS berupa mobil Ambulance lengkap dengan peralatan medis
- e. Relokasi Lokal (Fakir Miskin)
Pengembangan budidaya Perikanan dilahan Eks Tambangbagi Fakir Miskin;
- f. Penjajagan MOU Nusantara Strategis House;
- g. Penerimaan Lansia Terlantar On-line (PLT ON-Line);
- h. Penyediaan Sarana Informasi dan Komunikasi berupa Media Center;
- i. Pembentukan TIM Dewan Gelar pada Kegiatan Kepahlawanan

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Adapun sarana dan prasarana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3.426	m2
2	Gedung	3	Unit (3 Lantai)
		1.335	m2
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang



No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Hal ini dijadikan sebagai landasan untuk berfikir, berpijak dan bertindak dalam penyusunan Visi, Misi dan Strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial daerah Kalimantan Timur.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata serta dapat dirasakan oleh seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan yang berkeadilan sosial.

1. VISI

Upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diharapkan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur terus menerus mengembangkan inovasi baru dalam merebut peluang yang ada. Selalu berada di depan mengikuti perkembangan masalah kesejahteraan sosial yang dewasa ini semakin pesat. Kuatnya persaingan, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk tetap eksis dan unggul untuk senantiasa ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat (Stakeholder).

Atas dasar itulah, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi Dinas Sosial akan diarahkan dan berkarya, sehingga tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah. Rumusan Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah :

”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah:

Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat dapat mengenal Instansi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan ikut berperan dalam program-programnya sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial;
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Misi tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai ”Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” diperlukan : peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan pemberdayaan PMKS, meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan)

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kalimantan Timur

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kalimantan Timur;

5. Indikator Kinerja Sasaran

Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

6. Target Tahunan

Dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Timur Dinas Sosial Provinsi menetapkan target tahunan dan dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 3. Target Tahunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosen	6,60	11	11	8	1.5	1.5

Adapun untuk melihat program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 4. Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM DAN KEGIATAN APBD						
1	Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.5%	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.5%	Prosen	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
					Program pembinaan anak terlantar	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
					Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pendiidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
						Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
					Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
						Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
					Program Penanggulangan Kemiskinan bidang kesejahteraan sosial	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya
						Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
						Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
					Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin
PROGRAM DAN KEGIATAN APBN						
					Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Perencanaan Dan Penganggaran
					Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
						Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
						Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
						Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Korba Penyalahgunaan NAPZA

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP)**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
						Jaminan Sosial Keluarga
					Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin Wilayah II
					Tugas Pembantuan	Program Pemberdayaan Sosial

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Pencapaian indikator kinerja utama ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Pehitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Mengukur terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah Populasi PMKS}} \times 100 \%$	Laporan Instansi Sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber lain yang valid.	Dinas Sosial dengan melibatkan Instansi Terkait .

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja tahun 2019 dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran yang dilakukan oleh TAPD yang kemudian dilakukan penyesuaian target yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD 2019 – 2023, untuk tahun 2019 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana ikhtisar di bawah ini:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5 % pertahun	Prosen	1.5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018 dan 2019.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.05	23.06
2	Pengukuran Kinerja	25%	17.81	17.81
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.97	10.97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5.49	5.49
5	Capaian Kinerja	20%	11.44	11.44
Nilai Hasil Evaluasi			68.78	68.77
Kategori Penilaian			B	B

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan penetapan Kinerja Tahun 2019, yang merupakan Implementasi Rencana Strategis 2019 - 2023. Sedangkan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 8. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosen	1.5	Triwulan I	0	0	-
		1.5% pertahun			Triwulan II	0.25	0.25	100
					Triwulan III	0.5	0.5	100
					Triwulan IV	0.75	1	125

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019:

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	1.5	1.47	98

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 10. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/Penurunan
			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6) / 5*100%
1.	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	1.7	1.6	1.8	1.47	0.84 %

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2019 ini dengan capain kinerja beberapa tahun sebelumnya cenderung sama.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja.

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 11. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	7.5	1.47	19.60

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Capaian kinerja pada tahun ini dengan capain kinerja tahun lalu sudah tercapai dengan target awal RPJMD karena hampir seluruh target pada Program dan Kegiatan baik bersumber dari dana APBD maupun APBN tercapai dengan baik. Adapun pada kegiatan penanganan korban bencana alam dan sosial melebihi dari target realisasi, hal ini disebabkan karena bencana yang terjadi tidak bisa di targetkan atau di prediksi.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial pemerintah provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 5 UPTD yang berfungsi sebagai unit-unit pelayanan sosial penanganan PMKS dalam panti diantaranya UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Nirwana Puri (daya tampung 110 orang), UPTD Panti Sosial Bina Remaja (daya tampung 60 orang) yang berfungsi melaksanakan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi remaja dan putus sekolah, UPTD Panti Sosial Anak Harapan (daya tampung 80 anak) dan UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (daya tampung 80 anak) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu, anak terlantar anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan yang terakhir yaitu UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (daya tampung 80 klien) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi wanita rawan sosial ekonomi dan wanita korban *human trafficking*.

5. Analisis Program / Kegiatan.

Untuk mencapai Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilakukan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi ‘core’ penanganan bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2018 meliputi:

- a. Pemberian bantuan terhadap PMKS melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dapat mandiri sejumlah 20 Kelompok Keluarga Usaha Bersama yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga per 1 KUBE, pada tahun 2019 baik keluarga miskin perkotaan, keluarga miskin perdesaan atau keluarga miskin daerah terpencil dan pulau terluar direncanakan sebanyak 20 KUBE (200 KK) dan terealisasi sebanyak 20 KUBE (200 KK) atau dengan tingkat capaian 100%.
- b. Pemberian bantuan Lanjut Usia melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 270 Orang. Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 270 Orang dan terealisasi sebanyak 270 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%.
- c. Bantuan sarana & prasarana berupa pembangunan rumah layak huni dan pembangunan MCK bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebesar 60 KK atau 240 Jiwa yang berlokasi di Kabupaten Berau. Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 60 KK dan 1 MCK teralisasi sebanyak 60 KK dan 1 MCK dengan tingkat capaian 100%.
- d. Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 50 KPM. Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 50 KPM dan teralisasi sebanyak 50 KPM dengan tingkat capaian 100%.

Berdasarkan penanganan tersebut, disamping program dan kegiatan lain yang tidak berdampak langsung terhadap PMKS, maka dapat disimpulkan dengan mengacu pada formula dalam pengukuran capaian kinerja jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan jumlah populasi PMKS Provinsi Kalimantan timur yang berjumlah 251.234 Jiwa. Adapun terdapat capaian kinerja yang melampaui target yaitu 1,47%

- **Permasalahan**

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahteraan sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial,

kecacatan, keterasingan dan keterpencilan serta korban bencana yang secara operasional disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial antara lain meliputi :

1. Perpindahan Ibu Kota Negara menuju Kalimantan timur akan berdampak yaitu akan menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain, kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan (unskill) yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan PMKS di Kab/Kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk Kabupaten/Kota;
3. Terdapat *Blank Spot* di salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur menyebabkan keterlambatan dalam mengupdate data pada daerah yang bersangkutan;
3. Sinkronisasi program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal;
4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya aparatur dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan penanganan program-program kesejahteraan sosial;
5. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peraturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran baik di pusat maupun di daerah;
6. Rotasi dan mutasi baik ditingkat pejabat maupun ditingkat staf di kab/Kota berlangsung begitu cepat sehingga mempengaruhi profesionalisme penanganan PMKS;
7. Kelembagaan sosial di Kab/Kota masih bergabung dengan kelembagaan lainnya sehingga penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak berjalan secara maksimal;

- Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja Dinas-Dinas / Instansi Sosial Kab/Kota se Kalimantan Timur;
2. Langkah antisipasi dengan pembentukan Panti Sosial Terpadu yang pernah di wacanakan pada Tahun Anggaran 2014 untuk direalisasikan / dilanjutkan kembali;
3. Perlunya di bentuk Unit Layanan Penanganan Masalah Sosial (On Call) stand by 24 jam melalui Tim Unit Tanggap Sosial (TUNTAS) yang akan di rencanakan pada Tahun Anggaran 2021;
4. Relokasi Lokal (Fakir Miskin) Pengembangan budidaya Perikanan dilahan Eks Tambang bagi Fakir Miskin;
5. Mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program skala prioritas dan mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada PMKS serta mendorong peran aktif dunia usaha melalui CSR;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah provinsi Kalimantan Timur;
7. Penajaman program-program kesejahteraan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti peningkatan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian Usaha Ekonomi Produktif;
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikut sertakan pegawai yang ada dilingkup dinas sosial Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Adapun analisis efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 12. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	95	87,48	7,52

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah 7,52% yang didapatkan dari perbandingan kembali hasil output dan input hasil capaian kinerja dan penyerapan Anggaran.

D. Realisasi Anggaran

Capain kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diterima baik yang bersumber dari dana APBD Provinsi maupun dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN Murni).

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 13. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1.5	1.47	95	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Berau dan Mahulu.	Rp. 42.278.846.854	87,48

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sudah memenuhi target yaitu 95%.

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan**A. Realisasi Anggaran APBD**

Secara keseluruhan realisasi anggaran APBD Januari sampai dengan Desember tahun 2019 sebesar 42,728,846,854 dari total anggaran sebesar 48,852,915,000 atau sebesar 87,48%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. Realisasi Anggaran APBD

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Tidak Langsung	Samarinda	22,683,950,105	81.92	
	Belanja Langsung	Samarinda	20,044,896,749	94.77	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Samarinda	5,476,476,755	86.15	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Samarinda	3,267,911,953	90.08	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Samarinda	1,705,107,065	98.05	
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Samarinda	224,598,800	95.01	
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10 Kab / Kota	315,471,00	82.11	
6	Program pembinaan anak terlantar	10 Kab / Kota	925,540,700	99.38	
7	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	10 Kab / Kota	625,206,30	98.87	
8	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Samarinda	4,854,256,196	94.49	
9	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	10 Kab / Kota	391,501,800	99.24	
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10 Kab / Kota	340,350,500	98.87	



No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	%	
11	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	10 Kab / Kota	2,237,376,100	98.94	
12	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	10 Kab / Kota	300,834,200	95.14	
13	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	10 Kab / Kota	162,095,360	92.44	
Total			42.728.846.854	87.48	

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan capaian anggaran APBD tahun 2019 belanja tidak langsung sebesar 81,92% dan belanja langsung sebesar 94,77% sehingga secara keseluruhan capaian anggaran APBD tahun 2019 adalah sebesar 87,48%.

B. Realisasi Anggaran APBN

Secara keseluruhan realisasi anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi) dan realisasi APBN (Tugas Pembantuan) tahun 2019 sebesar 16,734,844,300 dari total anggaran sebesar 17,022,362,000 atau sebesar 98,31% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15. Realisasi Anggaran APBN

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
A. Dana Dekonsentrasi					
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian sosial	Samarinda	236,056,700	98.14	
2	Program pemberdayaan sosial	10 Kab / Kota	2,216,027,800	96.33	
3	Program rehabilitasi sosial	10 Kab / Kota	1,916,259,300	97.12	
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	10 Kab / Kota	4,706,062,040	99.21	



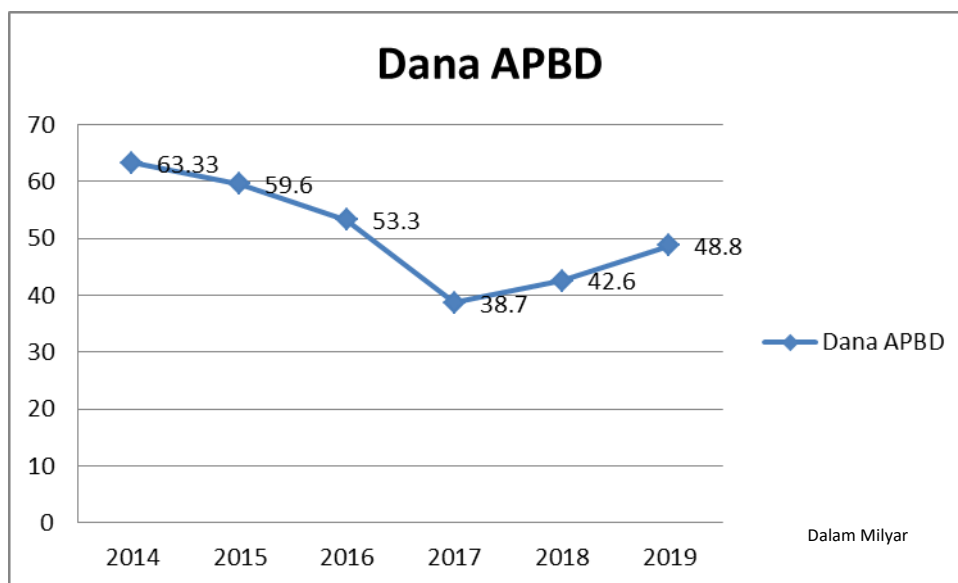
No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	%	
5	Program penanganan fakir miskin	10 Kab / Kota	4,325,947,300	99.05	
Jumlah			13,797,968,140		
B. Tugas Pembantuan					
1	Program pemberdayaan sosial	Kab. Paser	2,936,876,160	99.55	
Jumlah			2,936,876,160		
Jumlah Keseluruhan (A + B)			16,734,844,300	98.31	

Secara keseluruhan serapan anggaran APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) sebesar 98,31%.

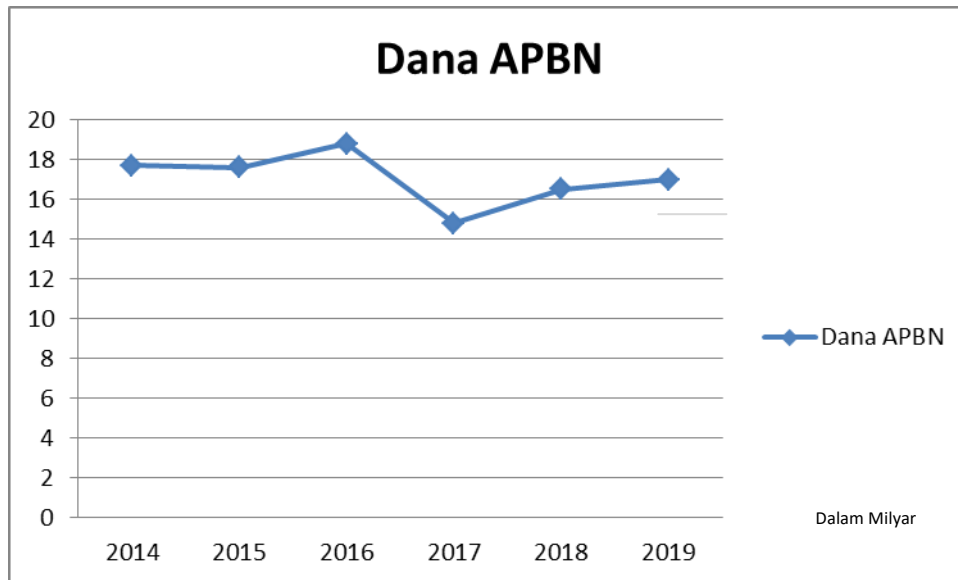
C. Perkembangan jumlah anggaran

Capaian kinerja Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh besaran jumlah anggaran yang diterima setiap tahunnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah anggaran Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dari tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019.



Grafik 2. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan permasalahan sosial tidak dapat diselesaikan tanpa adanya proses perencanaan yang terpadu untuk menghasilkan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan penanganan PMKS. Kegiatan secara integral baik program dan kegiatan yang bersumber baik melalui APBD maupun Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2023 telah tercapai, hal ini ditandai dengan beberapa sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan angka pencapaian yang sangat signifikan.

Demikian pula dengan capaian kinerja pada tahun 2019 juga menunjukan tingkat keberhasilan disebabkan oleh tercapainya seluruh kegiatan yang bersifat operasional. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran, berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik dari segi sumberdaya manusia/aparatur maupun dana anggaran yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami Pimpinan beserta segenap aparatur dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan agar LAKIP Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja yang akan datang.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini dibuat sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban kami terhadap masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Kepala,

H. M. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.SI.

Pembina Tingkat I / IV/b

NIP. 19670817 199203 1 017